V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di bab sebelumnya dan temuan-temuan di lapangan mengenai partisipasi perempuan dalam perumusan peraturan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat didapatkan kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Partisipasi perempuan di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah cukup baik, ini dapat dilihat dari perannya dibeberapa instansi pemerintah daerah yang sudah menduduki jabatan yang cukup tinggi. Sedangkan kiprah perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD sudah berperan baik sebagai anggota dewan yaitu menjalankan fungsi legislasi. Partisipasi dalam perumusan perda diantaranya terlibat dalam kegiatan reses, mengikuti rapat engan pihak terkait, terlibat aktif dalam rapat Pansus dan rapat paripurna. Namun anggota DPRD perempuan masih lemah dalam menduduki jabatan structural pada alat kelengkapan dewan.

2. Adapun faktor- faktor penghambat partisipasi perempuan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ; Budaya patriarki, kurangnya dukungan partai politik, dan disebabkan karena jumlah anggota DPRD perempuan sedikit.

3. Adapun faktor-faktor pendorong partisipasi perempuan dalam perumusan Peraturan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, diantaranya : Tingkat pendidikan, kesempatan yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi, pelibatan masyarakat dalam proses pengkajian Raperda, dan peran media cetak lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam perumusan peraturan daerah penulis memberikan saran mengenai hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya perempuan terlibat dalam panggung politik agar bisa membawa aspirasi perempuan khususnya tentang isu kesetaraan gender.
2. Mengupayakan terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan di parelemen sebanyak 30%, dengan menempatkan perempuan-perempuan yang memiliki kredibilitas dengan mementingkan kualitas, bukan kuantitas dari kebijakan *affirmative quetenya.*
3. Anggota DPRD laki-laki agar dapat memaksimalkan lagi dalam memberikan ruang partisipasi bagi anggota DPRD perempuan.
4. Pemerintah Daerah senantiasa mendorng terus peran serta perempuan baik dilingkungan pemerintahan maupun dilembaga- lembaga Negara lainya dan pembinaan sebagai asset daerah.
5. Dibuat data terpilah per SKPD, yang mengkategorikan data perempuan dan laki-laki untuk memudahkan penyusunan Indikator Pembangunan Gender dan Indikator Pemberdayaan Gender.